

Pengaruh Sistem *Catur Wangsa* terhadap Perwujudan Tata Spasial Kota Peninggalan Kerajaan Hindu di Bali: Kasus Kota Karangasem

I Gusti Ngurah Wiras Hardy, Bakti Setiawan, Budi Prayitno
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
E-mail: ngurahwiras@gmail.com

Abstract

Karangasem City is one of the heritage cities of Karangasem Kingdom in Bali which has a typical spatial layout and society life. The society of Karangasem City is divided into several classes based on the *catur wangsa* (social group) which is presumed affecting the realization of spatial layout of Karangasem City physically. It is interesting to conduct a deeper investigation on it to identify the effect of the system, so that it can be used as an input to manage and develop Karangasem City in the future. In investigating the effect, the method used in this study is qualitative method with inductive-qualitative technique and three data collection techniques, they are field observation, in-depth interview with purposive sampling, and literature study. Based on the results of the study, it is understood that the *catur wangsa* system took part in affecting the spatial layout of Karangasem City in which divided the city area into three layers of concentric circles according to the level of social classes that inhibits each of the layers. It also shows the suitability of Karangasem City spatial layout with the *tri mandala* (three spaces) concept which divides the area of Karangasem City into three layers.

Keywords: *catur wangsa*, city spatial layout, Hindu Kingdom, Karangasem City.

Abstrak

Kota Karangasem merupakan salah satu kota peninggalan Kerajaan Karangasem di Bali yang memiliki karakteristik tata spasial kota dan kehidupan masyarakat yang khas. Masyarakat Kota Karangasem terbagi menjadi beberapa golongan menurut sistem *catur wangsa* (kelompok sosial), yang diduga turut mempengaruhi perwujudan tata spasial Kota Karangasem secara fisik. Hal ini menarik untuk ditelusuri lebih mendalam untuk mengidentifikasi pengaruh sistem tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam menata dan

mengembangkan Kota Karangasem pada masa yang akan datang. Dalam menelusuri pengaruh tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis induktif-kualitatif dan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam dengan *purposive sampling*, dan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa sistem *catur wangsa* turut memengaruhi tata spasial Kota Karangasem, yang membagi wilayah kota menjadi tiga lapis lingkaran konsentris sesuai dengan tingkatan golongan masyarakat yang menghuni masing-masing lapisan tersebut. Hal ini menunjukkan pula kesesuaian tata spasial Kota Karangasem dengan konsep *tri mandala* (tiga ruang) yang membagi wilayah Kota Karangasem menjadi tiga lapisan wilayah.

Kata kunci: *catur wangsa*, tata spasial kota, Kerajaan Hindu, Kota Karangasem.

Pendahuluan

Kota merupakan wadah kegiatan dan cerminan dari kehidupan manusia, yang tersusun dari ruang-ruang yang dibutuhkan manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Dalam hal ini, perwujudan fisik sebuah kota dipengaruhi oleh pelbagai pertimbangan dan tekanan yang berasal dari masyarakat, seperti kondisi lingkungan, politik, sosial, budaya, agama, dan ekonomi (Nas dan Boender 2002). Salah satu pertimbangan yang turut mempengaruhi tata spasial kota adalah kondisi sosial masyarakat, terutama yang terkait dengan golongan (kelompok) sosial dan strata sosial dalam masyarakat. Menurut Nas dan Boender (2002), hal tersebut dapat diamati pada kondisi kota-kota lama di Indonesia yang memiliki peran utama sebagai penanda kekuasaan atas hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Kondisi tersebut turut mempengaruhi tata spasial kota-kota lama di Indonesia yang membentuk suatu lingkaran konsentris sebuah kota.

Kota Karangasem merupakan salah satu kota lama dan kota peninggalan Kerajaan Hindu di Bali yang masyarakatnya terbagi menjadi beberapa golongan dengan strata sosialnya. Kota Karangasem merupakan kota peninggalan Kerajaan Karangasem yang telah berdiri sejak abad XVII dan merupakan salah satu kerajaan besar pada masa tersebut (Putra Agung 2009). Sejak masa berdirinya Kota Karangasem, masyarakat Kota Karangasem telah hidup dalam pembagian golongan atau kelompok tertentu, berdasarkan jenis pekerjaan, garis keturunan, dan asal masyarakatnya. Salah

satu sistem pembagian golongan masyarakat yang masih bertahan hingga sekarang adalah sistem *catur wangsa*.

Sistem *catur wangsa* membagi masyarakat Kota Karangasem menjadi empat golongan masyarakat berdasarkan garis keturunan dan strata sosial masyarakatnya. Sistem *catur wangsa* yang telah ada sejak masa kerajaan di Kota Karangasem, diduga berpengaruh terhadap perwujudan tata spasial Kota Karangasem. Pengaruh tersebut diantaranya dapat diamati di pelbagai peninggalan Kerajaan Karangasem yang hingga sekarang masih dapat ditelusuri dan diamati keberadaannya di Kota Karangasem. Hal ini menarik untuk ditelusuri lebih mandalam untuk mengidentifikasi pengaruh sistem *catur wangsa* terhadap perwujudan tata spasial Kota Karangasem.

Hingga saat ini, penelitian-penelitian mengenai kota peninggalan kerajaan di Bali masih dilakukan secara parsial dan identifikasi yang dilakukan masih terbatas pada salah satu komponen. Beberapa penelitian tersebut di antaranya dilakukan oleh (1) Putra (2005), Putra (2008a), Putra Agung (2009), Suardana (2011), dan Juliarthana (2012) yang meneliti mengenai *catuspatha* atau *pempatan agung*; (2) Munandar (2005) dan Putra (2008b) yang melakukan penelitian mengenai *puri*; dan (3) Geertz (1980) dan Putra Agung (2009) yang meneliti mengenai kondisi masyarakat kota kerajaan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk melengkapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan terutama mengenai Arsitektur Bali dan kota-kota lama di Indonesia. Selain itu, secara pragmatis dapat dijadikan sebagai masukan atau pendekatan dalam menata, mengembangkan, atau menyusun kebijakan mengenai Kota Karangasem, yang telah ditetapkan sebagai salah satu anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia.

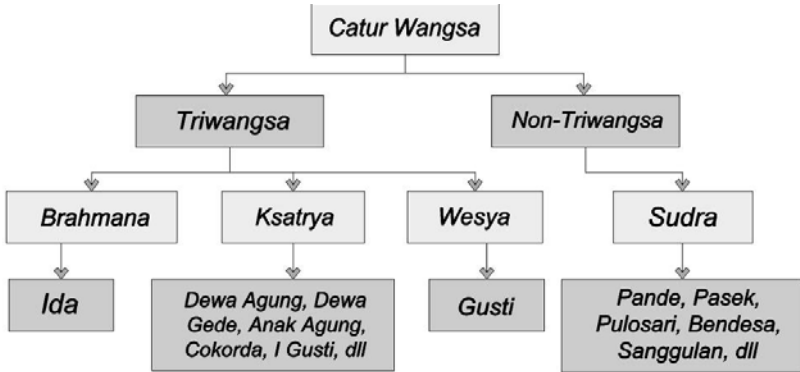
Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi pengaruh sistem *catur wangsa* terhadap perwujudan tata spasial Kota Karangasem. Proses pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik, yaitu (1) observasi lapangan untuk memperoleh data primer mengenai sistem *catur wangsa*, kondisi masyarakat Kota Karangasem, dan kondisi tata spasial Kota Karangasem; (2) wawancara mendalam terhadap narasumber berkompeten yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*

(kriteria), untuk memperoleh data pendukung dan memperdalam data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan; dan (3) studi literatur untuk memperoleh data sekunder mengenai sistem *catur wangsa* dan kondisi masyarakat Bali.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik induktif-kualitatif, untuk mengidentifikasi pengaruh sistem *catur wangsa* terhadap perwujudan tata spasial Kota Karangasem berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Tahapan penelitian diawali dengan menelusuri kondisi masyarakat, sistem *catur wangsa*, dan kondisi tata spasial Kota Karangasem melalui observasi lapangan yang didukung dengan wawancara mendalam terhadap narasumber. Hasil penelusuran tersebut selanjutnya didialogkan dengan hasil studi literatur hingga diperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian.

Sistem Catur Warna dan Catur Wangsa di Bali

Dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali, dikenal adanya sistem pengelompokan masyarakat yang disebut dengan *catur warna* dan *catur wangsa*. Sistem pengelompokan masyarakat ini, mulai dikenal oleh masyarakat Bali sejak masuknya pengaruh Agama Hindu di Bali. Meskipun demikian, dalam perkembangannya terdapat kerancuan dalam masyarakat yang cenderung menyamakan *catur warna* dengan *catur wangsa*. Menurut Putra Agung (2009), *catur warna* terdiri dari dua kata yaitu *catur* yang berarti empat, dan *warna* atau *wri* yang berarti memilih pekerjaan. Dengan demikian, *catur warna* dipahami sebagai sistem pembagian masyarakat menjadi empat kelompok atau golongan berdasarkan konsep *dharma* atau *swadharma*, yaitu sesuai dengan kewajiban, bakat, atau jenis pekerjaan. Sementara itu, *catur wangsa* atau *catur jatma* merupakan sistem pembagian masyarakat menjadi empat golongan berdasarkan konsep *jati* (*jan*: lahir), yaitu sesuai dengan garis keturunan atau kelahiran. Hal ini yang menyebabkan istilah *catur wangsa* sering disalahartikan dengan kasta yang terkait dengan keturunan atau ras.

Gambar 1. Sistem *wangsa* di Bali

(Sumber: modifikasi dari Leeman 1933, dalam Parimartha, dkk 2013: 322)

Menurut sistem *catur warna*, masyarakat dibagi menjadi empat kelompok atau golongan berdasarkan kewajiban, bakat, atau pekerjaan, yaitu (1) *brahmana* adalah golongan masyarakat yang berkewajiban dalam bidang keagamaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti: pendeta, *sulinggih*, atau rohaniawan; (2) *ksatria* adalah golongan masyarakat yang berkewajiban dalam bidang pemerintahan dan militer, seperti: raja, *punggawa*, atau pejabat; (3) *wesya* adalah golongan masyarakat yang berkewajiban dalam bidang kesejahteraan masyarakat, seperti: pedagang; dan (4) *sudra* adalah golongan masyarakat yang berkewajiban membantu golongan *brahmana*, *ksatria*, dan *wesya*, seperti: pekerja dan buruh. Sementara itu, empat golongan masyarakat menurut *catur wangsa* sama dengan pembagian menurut *catur warna*, yang terdiri dari: *brahmana*, *ksatria*, *wesya*, dan *sudra*, namun tidak berubah sepanjang hidup karena terikat dengan keturunan. Dalam kehidupan masyarakat Bali, golongan *brahmana*, *ksatria*, dan *wesya* disebut pula dengan istilah *triwangsa*, sedangkan golongan *sudra* disebut dengan istilah *jaba*.

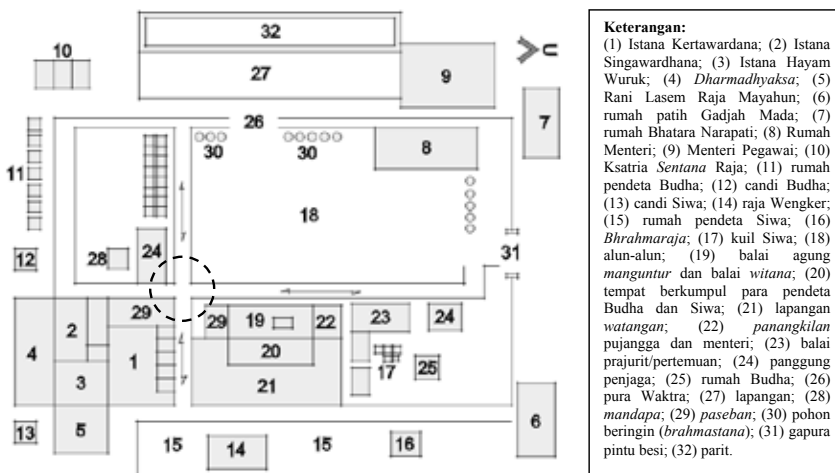
Tata Spasial Kota Peninggalan Kerajaan Hindu di Bali

Kota-kota modern yang saat ini terdapat di Bali, bermula dari berdirinya kota-kota Kerajaan Hindu sejak masa Bali Pertengahan/Bali Arya (sekitar abad XVII). Kota-kota kerajaan tersebut memperoleh pengaruh langsung dari Kerajaan Majapahit, yang sempat menguasai Pulau Bali pada masa tersebut. Pengaruh

Kerajaan Majapahit mencakup pelbagai bidang, seperti bidang keagamaan, politik dan pemerintahan, sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk dalam bidang arsitektur. Salah satunya, pengaruh tersebut dapat dilihat dari tata spasial kota-kota Kerajaan Hindu di Bali, yang mengadaptasi konsep *catuspatha* atau *pempatan agung* dari Keraton Majapahit (Runa 2008). Menurut Geertz (1980), *catuspatha* pada awalnya diadaptasi untuk menata Kota Kerajaan Samprangan dan dalam perkembangannya diadaptasi oleh kota-kota kerajaan lainnya di Bali.

Dalam naskah Nagarakretagama yang direkonstruksi oleh Muljana (2012), dapat diidentifikasi keberadaan *catuspatha* yang terletak di sebelah selatan alun-alun kota. *Catuspatha* dibentuk oleh persilangan dua ruas jalan, yaitu jalan yang mengarah ke utara-selatan dan jalan yang mengarah ke timur-barat. Beberapa fungsi ruang yang dapat diidentifikasi di sekitar areal *catuspatha*, antara lain alun-alun, istana atau keraton, balai agung *manguntur*, panggung penjaga dan rumah abdi dalem, balai *witana*, dan lapangan *watangan*. Hal ini menunjukkan fungsi utama *catuspatha* sebagai penanda pusat kota dan pusat kekuasaan di Kerajaan Majapahit.

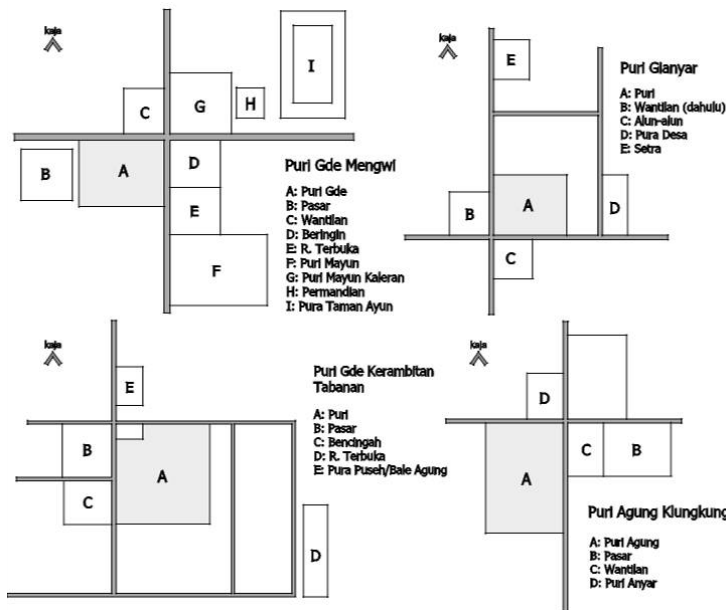
Catuspatha atau *pempatan agung* dipahami sebagai pertemuan dua ruas jalan utama yang membentuk simpang empat sakral dengan pelbagai fungsi ruang di sekitarnya (Putra 2005). Secara filosofis, *catuspatha* dipandang sebagai pusat dunia atau alam



Gambar 2. Rekonstruksi Kota Kerajaan Majapahit berdasarkan naskah Nagarakretagama (Sumber: modifikasi dari Muljana, 2012)

semesta, sedangkan secara fungsional, *catuspatha* dipahami sebagai pusat pelbagai kegiatan masyarakat, terutama kegiatan keagamaan, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal tersebut ditandai dengan beberapa fungsi ruang yang terdapat di sekitar *catuspatha*, seperti: (1) *puri* atau keraton sebagai kediaman raja dan pusat pemerintahan pada masa lalu; (2) *peken* atau pasar tradisional sebagai pusat kegiatan perdagangan dan ekonomi masyarakat; (3) bangunan *wantilan* atau *bale banjar* sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya; dan (4) ruang terbuka sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya (Budihardjo 1986). Salah satu fungsi ruang yang saat ini relatif masih bertahan dan masih dapat diamati adalah *puri* atau keraton, yang kini digunakan sebagai kediaman keluarga raja dan keturunannya (Putra 2008b; Juliarthana 2012).

Menurut Putra (2008b), keberadaan *puri* sangat penting karena menandai awal mula berdirinya kota-kota modern yang berkembang di Bali hingga masa sekarang. Keberadaan kota-kota modern tersebut diawali dari keberadaan *puri* yang memicu konsentrasi pertumbuhan penduduk di sekitar *puri* hingga terbentuk kota-kota seperti sekarang. Oleh karena itu, keberadaan *puri* dipandang



Gambar 3. Penerapan konsep *catuspatha* dan lokasi *puri* di beberapa kota di Bali
(Sumber: modifikasi dari Putra 2008a; Hardy, dkk 2015)

sebagai awal mula dan pusat perkembangan kota-kota di Bali hingga masa sekarang dan telah menjadi salah satu *landmark* atau penanda pusat kota-kota di Bali. Pada masa sekarang, sebagian besar *puri* di Bali masih bertahan, sedangkan beberapa *puri* lainnya telah beralih fungsi sebagai perkantoran atau pusat pemerintahan. Meskipun demikian, pelbagai peninggalan *puri-puri* tersebut masih dapat diidentifikasi dan ditelusuri keberadaannya melalui pelbagai catatan sejarah dan penelusuran terhadap keberadaan *catuspatha* atau *pempatan agung*.

Sistem Catur Wangsa dan Kondisi Masyarakat Kota Karangasem

Masyarakat Kota Karangasem terbagi menjadi beberapa kelompok atau golongan, yang diantaranya dibedakan menurut jenis pekerjaan atau profesi, garis keturunan, dan asal masyarakatnya. Dalam hal ini, pembagian golongan masyarakat yang paling menonjol adalah pembagian masyarakat menurut garis keturunan, yang disebut dengan *catur wangsa* atau *catur jatma*. Menurut Putra Agung (2009), sistem *catur wangsa* membagi masyarakat menjadi empat golongan menurut garis keturunannya, yaitu (1) *brahmana* adalah golongan rohaniawan dan cendekiawan yang berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan atau keturunannya; (2) *ksatria* adalah golongan pemimpin yang berkewajiban dalam bidang pemerintahan dan militer atau keturunannya; (3) *wesya* adalah golongan pedagang yang berkewajiban dalam bidang kesejahteraan masyarakat atau keturunannya; dan (4) *sudra* adalah golongan pekerja atau keturunannya. Masing-masing golongan memiliki peran yang penting dan saling membutuhkan dalam kehidupan, sehingga masyarakat meyakini bahwa keharmonisan antargolongan tersebut akan dapat mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan asalnya, masyarakat Kota Karangasem dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu (1) *kawula* atau *kaula* merupakan masyarakat asli Karangasem; dan (2) *wong dura-desa* atau *wong sunantara* merupakan masyarakat asing atau masyarakat yang berasal dari luar wilayah Karangasem dengan tujuan menetap atau tinggal sementara, di antaranya Orang Sasak, Jawa, Melayu, Tionghoa, dan Eropa (Putra Agung 2009). Dalam hal ini, masyarakat yang telah lama menetap di Kota Karangasem dianggap sebagai bagian dari masyarakat Kota Karangasem yang

memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Salah satu contohnya adalah masyarakat Sasak yang telah menetap dan membangun kampung di Kota Karangasem sejak masa kerajaan, sehingga telah dianggap sebagai saudara dengan sebutan *nyama Sasak* (*nyama*: saudara).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat Kota Karangasem telah hidup dalam golongan-golongan tertentu, yang dibagi menurut jenis pekerjaan, garis keturunan, dan asal masyarakatnya. Meskipun demikian, masing-masing golongan tidak dapat berdiri sendiri dan memegang peranan penting dalam kehidupan. Pada masa sekarang, beberapa kelompok sosial tersebut masih diterapkan meskipun tidak konsisten seperti pada masa lalu. Keberadaan kelompok sosial tersebut pada masa sekarang, tetap dipandang sebagai warisan budaya yang memberi karakteristik terhadap kehidupan masyarakat Kota Karangasem. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut, diyakini pula memberi karakteristik terhadap tata spasial Kota Karangasem sebagai wadah kegiatan bagi masyarakat Kota Karangasem.

Pengaruh Sistem Catur Wangsa terhadap Perwujudan Tata Spasial Kota Karangasem

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa sistem *catur wangsa* di Kota Karangasem membagi masyarakat menjadi golongan *triwangsa* yang terdiri atas *brahmana*, *ksatrya*, dan *wesya*, dan golongan *jaba* atau *sudra*. Masing-masing golongan masyarakat tersebut memiliki ragam hunian yang berbeda, sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam masyarakat. Ragam hunian tersebut, yaitu (1) *puri* adalah hunian bagi golongan *ksatrya* (raja dan keluarganya); (2) *geria* adalah hunian bagi golongan *brahmana* (rohaniawan dan keluarganya); (3) *jero* adalah hunian bagi golongan *ksatrya* (*punggawa* atau yang tidak memegang kekuasaan dan keluarganya) atau *wesya* (bangsawan dan keluarganya); dan (4) *umah* atau rumah adalah hunian bagi golongan *jaba/sudra* atau *wong dura-desa*. Berdasarkan fungsi dan jumlah *palebahan* (pekarangan), masing-masing hunian tersebut memiliki tingkatan tertentu, yaitu (1) *puri* bernilai *utama*; (2) *geria* dan *jero* bernilai *madya*; dan (3) *umah* atau rumah bernilai *nista*.

Dalam hal ini, *puri* memiliki tingkatan *utama* karena memiliki jumlah *palebahan* yang paling banyak dan berfungsi sebagai hunian

raja (*ksatrya*) sebagai pemegang kekuasaan dan pemerintahan tertinggi di Kota Karangasem. Oleh karena itu, *puri* terletak di salah satu areal *catuspatha* atau *pempatan agung* yang dipandang sebagai simpang empat sakral dan pusat dunia, sehingga menjadi areal *utama* di Kota Karangasem. Letak *puri* di salah satu areal *catuspatha* dapat pula diamati di kota-kota peninggalan kerajaan lainnya di Bali, diantaranya letak *puri* di Kota Klungkung dan Mengwi. Puri Smarapura merupakan salah satu *puri* di Klungkung yang terletak di sebelah *kelod kauh* (barat daya) areal *catuspatha*. Sementara itu, Puri Gede/Ageng Mengwi sebagai salah satu *puri* di Mengwi terletak di sebelah *kelod kauh* areal *catuspatha*. Hal ini menunjukkan bahwa *catuspatha* dan *puri* memiliki peran penting sebagai penanda pusat kota dan areal *utama* sebuah kerajaan.

Dalam wilayah Kota Karangasem, terdapat empat *puri* yang terletak di sekitar areal *catuspatha*, yaitu (1) Puri Amlaraja atau Puri Kelodan di sebelah *kaja kauh* (barat laut) *catuspatha*; (2) Puri Gede Karangasem di sebelah *kaja* (utara) Puri Kelodan; (3) Puri Agung Karangasem atau Puri Kanginan di sebelah *kaja kangin* (timur laut) *catuspatha*; dan (4) Puri Kaleran di sebelah *kaja* (utara) Puri Gede Karangasem. Hal ini memperlihatkan bahwa seluruh *puri* di Kota Karangasem terletak di sebelah *kaja* (utara) *catuspatha* yang merupakan areal *hulu*, dan terletak di areal pusat kota sebagai areal *utama* Kota Karangasem.

Keterangan informan mengenai letak *puri-puri* di Kota Karangasem, dapat dipaparkan sebagai berikut:

“*pempatan agung* tersebut terletak di sebelah *kaja kauh* (barat laut) Pura Meru, karena itu seluruh *puri* yang terdapat di Karangasem terletak di sebelah *kaja* (utara) *pempatan agung*. *Kaja* tersebut mengarah ke Gunung Agung, yang memiliki nilai *utama*.” (petikan hasil wawancara, Putra Agung, bulan Januari 2015)

Sementara itu, *jero* terletak di sekitar kawasan *puri* sehingga masih terletak di kawasan pusat Kota Karangasem. *Jero* merupakan hunian dengan tingkatan *madya* karena memiliki jumlah *palebahan* yang lebih sedikit dibandingkan dengan *puri* dan berfungsi sebagai hunian *punggawa* atau penguasa daerah dan bangsawan yang tidak menjabat dalam pemerintahan. *Jero* dipandang pula sebagai “perluasan” dari *puri* karena masih menjadi bagian dari keluarga raja, yang membangun hunian di luar *puri* akibat keterbatasan luas

areal *puri*. Dalam wilayah Kota Karangasem, terdapat tujuh *jero* di sekitar kawasan *puri*, yaitu (1) Jero Kaler Kauh; (2) Jero Pekudaan; (3) Jero Taman; (4) Jero Kawan; (5) Jero Jagaraga; (6) Jero Kelodan Pesagi; dan (7) Jero Kelodan Celuknegara.

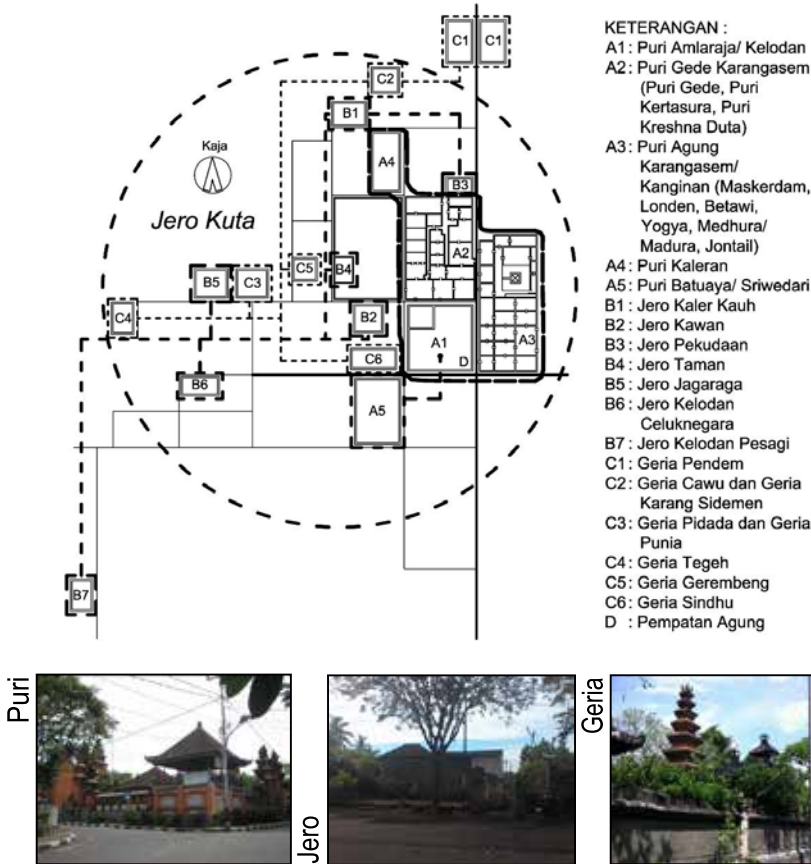
Keterangan beberapa informan mengenai *jero-jero* di Kota Karangasem, dapat dipaparkan sebagai berikut:

"*Jero* tersebut sebenarnya diperuntukan bagi keluarga Raja Karangasem yang bertugas sebagai *punggawa* atau yang tidak memegang kekuasaan pemerintahan. Pada masa lalu, keluarga raja makin bertambah sedangkan daya tamponya terbatas, sehingga dibangunlah *jero-jero* di sekitar *puri*. Oleh karena itu, seluruh penghuni *jero* masih memiliki hubungan keluarga dengan raja." (petikan hasil wawancara, Putra Agung, bulan Januari 2015)

"*Jero* itu berbeda dengan *puri*, tetapi pada masa sekarang sering disamakan. Meskipun demikian, seluruh penghuni *jero* maupun *puri* merupakan satu keluarga besar yang berasal dari keturunan Raja Karangasem dan keluarga beliau. Saat ini, terdapat tujuh *jero* yang terdapat di Kota Karangasem dan seluruhnya masih dapat diamati keberadaannya hingga sekarang" (petikan hasil wawancara, Wijaya Kusuma, bulan Januari 2015).

Hunian golongan *triwangsa* lainnya adalah *geria* yang merupakan hunian bernilai *madya* dengan jumlah *palebahan* (pekarangan) yang lebih sedikit dibandingkan dengan *puri* yang berfungsi sebagai hunian golongan *brahmana*. *Geria* di Kota Karangasem terletak di sekitar kawasan *puri*, karena pada masa lalu para *brahmana* bertugas sebagai penasihat raja dan bertanggung jawab terhadap pelbagai kegiatan ritual keagamaan. Pelbagai *geria* yang terdapat di Kota Karangasem, antara lain (1) *Geria Pendem*; (2) *Geria Pidada*; (3) *Geria Karang Sidemen*; (4) *Geria Cawu*; (5) *Geria Punia*; (6) *Geria Tegeh*; (7) *Geria Sindhu*; dan (8) *Geria Gerembeng*.

Sementara itu, hunian masyarakat golongan *sudra/kaula* dan *wong dura-desa* terletak di pinggiran kota atau luar pusat kota. Hunian masyarakat tersebut membentuk kelompok-kelompok hunian yang disebut dengan *umah-banjar pakraman* untuk golongan *sudra/kaula* dan rumah-kampung untuk golongan *wong dura-desa*, terutama yang berasal dari Lombok (Orang Sasak) dan Jawa. *Umah-banjar pakraman* dan rumah-kampung tersebut secara adat masuk ke dalam wilayah Desa Pakraman Karangasem yang merupakan kesatuan komunitas tradisional yang ditandai dengan keberadaan



Gambar 4. Tata letak *puri*, *jero*, dan *geria* (hunian *triwangsa*) di wilayah Kota Karangasem (Sumber: Hardy, dkk 2015; dokumentasi 2015)

Pura Kahyangan Tiga yaitu: Pura Puseh, Pura Desa/Bale Agung, dan Pura Dalem. Hingga saat ini Desa Pakraman Karangasem terdiri dari 33 *banjar pakraman*, yang dapat dibagi menjadi *banjar pakraman murwa* dan *banjar pakraman asesabu*.

Banjar pakraman murwa merupakan *banjar pakraman* “pendiri” yang menjadi *banjar pakraman* paling awal terbentuk di Desa Pakraman Karangasem. *Banjar pakraman murwa* terdiri dari 11 *banjar pakraman*, yaitu Banjar Pakraman (BP) Tegallinggah; BP. Belong; BP. Batan Nyuh Kaler; BP. Batan Nyuh Kelod; BP. Pangi; BP. Gelumpang; BP. Juuk Manis; BP. Bale Punduk Kaler; BP. Bale Punduk Kelod; BP. Tibulaka; dan BP. Winda. Sementara itu, *banjar pakraman asesabu* merupakan *banjar pakraman* “baru” akibat dari semakin banyaknya



Gambar 5. Kondisi *banjar pakraman* (kiri) dan kampung (kanan) di Kota Karangasem (Sumber: dokumentasi 2015)

jumlah *krama* (anggota masyarakat) Desa Pakraman Karangasem. *Banjar pakraman asesabu* terdiri atas 22 *banjar pakraman*, antara lain Banjar Pakraman (BP) Kenanga; BP. Taman Sudharma; BP. Ekacita; BP. Rata Dauh Kreteg; BP. Wirya Sari; BP. Kodok Darsana; BP. Dharma Darsana; BP. Sindhu Saraswati; BP. Karya Dharma; BP. Sida Karya; BP. Swadharma; BP. Kerta Raharja; BP. Buana Tirta; BP. Siki; BP. Kerti Celuknegara; BP. Pekandelan; BP. Dharma Yadnya; BP. Tri Dharma; BP. Guna Dharma; BP. Jangga Mekar; BP. Pebukit; dan BP. Kerta Bhayangkara.

Berdasarkan letaknya, *banjar-banjar pakraman murwa* terletak di wilayah pinggiran kota sebelah *kaja* (utara) wilayah pusat Kota Karangasem. Hal ini terkait dengan beberapa pertimbangan, antara lain letak areal pertanian dan perkebunan yang sebagian besar terletak di sebelah *kaja*, terkait dengan strata sosial masyarakat, dan terkait dengan sistem pertahanan wilayah pada masa lalu yang memanfaatkan benteng pertahanan alami dari hunian masyarakat. Sementara itu, letak *banjar-banjar asesabu* relatif berbeda dengan *banjar-banjar murwa* karena terletak di wilayah pusat Kota Karangasem akibat semakin meningkatnya jumlah hunian masyarakat kota seiring dengan berakhirnya masa pemerintahan Kerajaan Karangasem.

Berbeda halnya dengan *umah-banjar pakraman*, rumah-kampung yang pada awalnya dihuni oleh Orang-orang Sasak (Lombok) tersebar di pinggiran Kota Karangasem. Keberadaan Orang-orang Sasak ini terkait dengan sejarah Kerajaan Karangasem ketika Raja Karangasem memperluas wilayah kekuasaannya ke wilayah Lombok. Pada masa berakhirnya Perang Lombok, Raja Karangasem membawa Orang-orang Sasak sebagai *tetadtadan* atau pengawal raja

ketika kembali ke Karangasem. Dalam perkembangannya, orang-orang Sasak tersebut menetap dan membangun perkampungan di pinggiran Kota Karangasem yang berfungsi pula sebagai “benteng pertahanan” Kota Karangasem. Hingga saat ini, terdapat sepuluh kampung di sekitar pusat Kota Karangasem, yaitu Kampung Nyuling, Dangin Sema, Bangras, Karang Tohpati, Karang Langko, Gelumpang Suci, Jeruk Manis, Karang Ampel, Karang Tebu, dan Karang Cermen.

Berdasarkan pelbagai penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa, terdapat kesesuaian konsep *tri mandala* dengan tata letak kelompok hunian golongan *trivangsa*, *jaba/sudra*, dan *wong dura desa*. *Tri Mandala* membagi wilayah Kota Karangasem menjadi tiga *mandala* menurut hirarkinya, yaitu (1) *utama mandala* merupakan



Gambar 6. Pembagian *tri mandala* berdasarkan letak *puri*, *jero*, *geria*, *umah-banjar*, dan rumah-kampung di wilayah Kota Karangasem (Sumber: Hardy, dkk 2015)

wilayah pusat kota yang ditandai dengan keberadaan *catuspatha* dan *puri* sebagai hunian bernilai *utama*; (2) *madya mandala* merupakan wilayah sekitar pusat kota atau di sekitar *puri* yang ditandai dengan keberadaan *jero* dan *geria*; dan (3) *nista mandala* merupakan wilayah pinggiran kota yang ditandai dengan keberadaan *umah-banjar pakraman* dan rumah-kampung. Kesesuaian konsep *tri mandala* dan kelompok hunian tersebut membentuk tiga lapis lingkaran konsentris dengan *catuspatha* atau *pempatan agung* sebagai pusatnya. Lingkaran konsentris tersebut, dapat pula diamati secara umum di kota peninggalan Kerajaan Mengwi. *Puri* di Kota Mengwi terletak di areal *pempatan agung* yang merupakan areal *utama*. Sementara itu, letak *jero* dan *geria* terletak di luar areal *pempatan agung*. Letak ini sesuai dengan kedudukan dan tugas yang menjadi kewajiban masing-masing kelompok masyarakat.

Hal tersebut memperlihatkan pengaruh sistem *catur wangsa* di Kota Karangasem terhadap perwujudan tata spasial Kota Karangasem. Strata sosial menurut sistem *catur wangsa* termanifestasi dalam ketiga lapisan lingkaran konsentris yang menunjukkan areal *utama* sebagai pusat pemerintahan dan pusat dunia dan areal *madya* sebagai kelompok hunian *jero* dan *geria*, yang dikelilingi oleh “benteng pertahanan” yang dibentuk oleh kelompok hunian *umah-banjar pakraman* dan rumah-kampung sebagai areal *nista*. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa tata spasial Kota Karangasem pada masa kerajaan hingga sekarang terbentuk oleh beberapa pertimbangan tertentu, di antaranya strata sosial masyarakat, sumber mata pencaharian, kebutuhan masyarakat, dan sistem pertahanan Kota Karangasem. Meskipun dalam perkembangannya tata spasial tersebut telah mengalami dinamika, namun letak kelompok-kelompok hunian yang dipengaruhi oleh sistem *catur wangsa* masih dapat diamati sebagai salah satu karakteristik dari Kota Karangasem.

Penutup

Tata spasial Kota Karangasem menunjukkan kesesuaian dengan konsep *tri mandala* yang membagi wilayah Kota Karangasem menjadi tiga lapis lingkaran konsentris dengan *catuspatha* atau *pempatan agung* sebagai pusatnya. Ketiga lapisan lingkaran tersebut memiliki tingkatan atau hirarki sesuai dengan jenis kelompok hunian yang terdapat di dalam masing-masing lapisan lingkaran

tersebut. Lapisan-lapisan tersebut, yaitu (1) lapisan “paling dalam” bernilai *utama* yang merupakan kawasan *puri* sebagai hunian golongan *ksatria* yang terletak di areal *catuspatha*; (2) lapisan “tengah” bernilai *madya* yang merupakan kawasan *jero* sebagai hunian golongan *ksatria* dan *wesya*, dan *geria* sebagai hunian golongan *brahmana*, yang terletak di sekitar kawasan *puri*; dan (3) lapisan “luar” bernilai *nista* yang merupakan kawasan *umah-banjar pakraman* sebagai hunian golongan *sudra*, dan rumah-kampung sebagai hunian *wong dura-desa*, yang terletak di wilayah pinggiran Kota Karangasem.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem *catur wangsa* dalam masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi perwujudan tata spasial Kota Karangasem sejak masa awal terbentuknya hingga masa sekarang. Oleh karena itu, keberadaan kelompok-kelompok hunian tersebut hendaknya menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan penataan dan pengembangan Kota Karangasem, karena keberadaan hunian tersebut dapat memberi karakteristik yang khas terhadap perwujudan tata spasial Kota Karangasem.

Karakteristik tersebut dapat menjadi ciri khas Kota Karangasem yang merupakan salah satu anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Hingga saat ini, beberapa warisan Kerajaan Karangasem, seperti *puri* telah dilestarikan dan dikembangkan menjadi objek wisata. Meskipun demikian, *puri* sebagai objek wisata kurang diintegrasikan dengan peninggalan kerajaan lainnya. Beberapa peninggalan kerajaan lainnya, seperti *jero*, *geria*, pura, pasar tradisional, *umah-banjar pakraman*, dan rumah-kampung, yang terletak di sekitar pusat Kota Karangasem belum dikembangkan secara optimal sebagai daya tarik wisata. Padahal peninggalan-peninggalan kerajaan tersebut memiliki potensi untuk dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisata kota dan “museum hidup” di Kota Karangasem.

Terkait dengan hal tersebut, kota Karangasem berpotensi dijadikan sebagai wisata kota bersejarah, yaitu menyajikan sejarah Kota Karangasem dengan mengintegrasikan *puri*, *jero*, *geria*, pura, pasar tradisional, *catuspatha*, *umah-banjar pakraman*, rumah-kampung, dan aktivitas sosial budaya masyarakat, dalam satu kemasan daya tarik wisata yang khas. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kerjasama pemerintah, pengusaha, dan seluruh masyarakat untuk

mengintegrasikan peninggalan-peninggalan kerajaan tersebut menjadi kesatuan daya tarik wisata kota dan “museum hidup”, yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, sosial, budaya, dan sejarah. Dengan demikian, diharapkan upaya tersebut dapat mendorong seluruh pihak untuk turut serta dalam melestarikan keberadaan Kota Karangasem sebagai warisan budaya dan salah satu Kota Pusaka di Indonesia dengan identitas yang khas.

Ucapan Terima Kasih

Pada bagian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah yang telah Beliau limpahkan. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah membiayai pendidikan dan penelitian penulis, kepada bapak Prof. Dr. Anak Agung Gede Putra Agung, S.U. dan bapak Gede Wijaya Kusuma atas segala informasi yang telah diberikan selama penelitian, serta seluruh keluarga dan sahabat yang telah memberikan masukan dan motivasi. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Budihardjo, E. 1986. *Architectural Conservation in Bali*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Geertz, C. 1980. *Negara, The Theatre State in Nineteenth-Century Bali*. Princeton: Princeton University Press.
- Hardy, I G. N. W., Setiawan, B., dan Prayitno, B. 2015. *Tata Spasial Kota Kerajaan Karangasem*. Laporan penelitian disertasi belum dipublikasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Juliarthana, I N.H. 2012. *Bentuk dan Makna Spasial Konsep Catuspatha di Kota Denpasar, Kasus: Kawasan Ruang Terbuka Puputan Badung dan Lumintang*. Tesis belum dipublikasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Muljana, S. 2012. *Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit*. Yogyakarta: LKiS.
- Munandar, A. A. 2005. *Istana Dewa Pulau Dewata: Makna Puri Bali Abad ke 14-19*. Depok: Komunitas Bambu.
- Nas, P. J. M. dan Boender, W. 2002. Kota Indonesia Dalam Teori Perkotaan (terjemahan). Dalam Nas, P. J. M. 2007. *Kota-kota Indonesia: Bunga Rampai* (terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Parimatha, I G., dkk. 2013. "Sejarah Bali Pertengahan Abad XIV-XVIII." Dalam Ardika, I W., dkk. 2013. *Sejarah Bali, Dari Prasejarah Hingga Modern*. Denpasar: Udayana University Press.
- Putra, I G. M. 2005. Catuspatha, Konsep, Transformasi, dan Perubahan. *Jurnal Permukiman Natak Universitas Udayana*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2005: 62 – 101. Denpasar: Universitas Udayana.
- Putra, I G. M. 2008a. "Perubahan Ekspresi Catuspatha Dalam Tata Ruang Pusat Pemerintahan di Kota Denpasar 1906-2006: Perspektif Kajian Budaya." Disertasi belum dipublikasi. Denpasar: Universitas Udayana.
- Putra, I G. M. 2008b. Puri, Cikal Bakal Kota Modern di Bali. Dalam Sueca, N. P. (ed). 2008. *Pustaka Arsitektur Bali*. Denpasar: Ikatan Arsitek Indonesia, Daerah Bali.
- Putra Agung, A. A. G. 2009. *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Runa, I W. 2008. Sejarah Arsitektur Tradisional Bali. Dalam Sueca, N. P. (ed). 2008. *Pustaka Arsitektur Bali*. Denpasar: Ikatan Arsitek Indonesia, Daerah Bali.
- Suardana, I N. G. 2011. *Figur-figur Arsitektur Bali*. Denpasar: Penerbit Your Inspiration, Inc.

Daftar Informan

- Prof. Dr. Anak Agung Gede Putra Agung, S.U. adalah Guru Besar Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Udayana, Bali yang telah memasuki masa purna bakti, dan *penglingsir* (tokoh) serta pewaris Puri Agung Karangasem (Puri Kanginan).
- Gede Wijaya Kusuma adalah seorang tokoh masyarakat di Desa Pakraman Karangasem. Selama 15 tahun terakhir, beliau aktif sebagai anggota pengurus Desa Pakraman Karangasem.